Journal of Aafiyah Health Research (JAHR) 2024. Vol. 5, No. 1. Page 350-359
https://doi.org/10.52103/jahr.v5i1.1796
P-ISSN: 2722-4929, E-ISSN: 2722-4945

JOURNAL OF AAFIYAH HEALTH RESEARCH (JAHR)

Publisher: *Postgraduate Program, Universitas Muslim Indonesia*
Journal Homepage:
http://pascaumi.ac.id/index.php/jahr/index

Original Article

Capaian Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penderita Diabetes Mellitus Di RSUD Otanaha Kota Gorontalo

Nur Afifah Gaffar, *Nurhaedar Jafar, Andi Nurlinda

Program Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Article History
Received: 20 May 2024
Revised: 18 June 2024
Accepted: 18 July 2024

Keywords: *Kebijakan Standar Pelayanan; Pasien DM; Tercapai*

Corresponding Author:
E-mail:
eda_jafar@yahoo.co.id
Address: Jalan. Urip Sumoharjo, No. 5, 90231, Makassar, South Sulawesi, Indonesia

ABSTRAK

Latar Belakang: Banyaknya penderita diabetes mellitus berhubungan dengan perilaku masyarakat. Khususnya di Kota Gorontalo yang cenderung kurang aktif untuk mencari informasi mengenai diabetes mellitus secara menyeluruh, sehingga pengetahuan dan sikap masyarakat juga kurang guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Pentingnya menganalisis gambaran kebijakan standar pelayanan minimal yang tercapai bagi pasien DM di RSUD Otanaha Kota Gorontalo, agar pihak rumah sakit bisa meningkatkan kualitas pelayanan mereka.
Tujuan: Mengkaji gambaran kebijakan Standar Pelayanan Minimal yang telah tercapai bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo dikaji dari standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, dan lingkungan eksternal.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di RSUD Otanaha Kota Gorontalo. Pada penelitian ini terdapat dua informan yaitu informan utama yaitu Kepala Ruangan Pelayanan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan informan tringulasi yaitu tenaga Kesehatan yang terdiri dari Unsur Dokter dan unsur Perawat. Sumber informasi diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.
Hasil: Implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari aspek standar dan tujuan kebijakan, aspek komunikasi antar organisasi pelaksana, serta sikap pelaksana sudah terimplementasikan dengan baik.
Kesimpulan: Implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal dari aspek standar dan tujuan kebijakan, aspek komunikasi antar organisasi pelaksana, serta sikap pelaksana sudah terimplementasikan dengan baik. Bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) telah berjalan dengan baik.

ABSTRACT

Background: The number of diabetes mellitus sufferers is related to community behavior. Especially in Gorontalo City, they tend to be less active in seeking information about diabetes mellitus as a whole, so that people's knowledge and attitudes are also lacking in order to improve their quality of life. It is important to analyze the description of the minimum service policy standards achieved for DM patients at the Otanaha Regional Hospital, Gorontalo City, so that the hospital can improve the quality of their services.
Objective: To examine the description of the Minimum Service Standards policy that has been achieved for diabetes mellitus sufferers at the Otanaha Regional General Hospital (RSUD), Gorontalo City, examining the policy standards and objectives, resources, characteristics of implementing organizations, communication between implementing organizations, attitudes of implementers, and external environment.
Method: This research is qualitative research. This research was conducted at Otanaha Regional Hospital, Gorontalo City. In this study, there were two informants, namely the main informant, namely the Head of the Service Department, who was determined using a purposive sampling technique and triangulated informants, namely Health workers consisting of Doctors (Internal Medicine Specialists) and Nurses. Sources of information are obtained from primary data and secondary data. Data collection techniques are through interviews, observation and document analysis.
Results: Implementation of the Minimum Service Standards policy for diabetes mellitus sufferers at the Otanaha Regional General Hospital (RSUD) in Gorontalo City has gone well. Judging from the aspects of standards and policy objectives, aspects of communication between implementing organizations, as well as the attitude of implementers, they have been implemented well.
Conclusion: The implementation of the Minimum Service Standards policy from the aspects of policy standards and objectives, communication aspects between implementing organizations, as well as the attitude of the implementers has been implemented well. For diabetes mellitus sufferers at the Regional General Hospital (RSUD) it has gone well.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

PENDAHULUAN

Upaya untuk mewujudkan pelayanan berkualitas di Rumah Sakit antara lain dengan mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan salah satu acuan untuk jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang setiap warga berhak mendapatkannya. Bidang kesehatan merupakan salah satu dari enam bidang yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal dan standar teknis pelaksanannya diatur dalam Permenkes No. 4 Tahun 2019. Terdapat 12 indikator dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan daerah kabupaten/ kota, salah satunya ada pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus. Kewajiban pemerintah kabupaten/ kota adalah memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap penderita diabetes mellitus dengan usia lebih dari 15 tahun. Jika target capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh juga pada penilaian kinerja pemerintah daerah termasuk kepala daerah.

Secara umum implementasi Standar Pelayanan Minimal di Indonesia masih belum mencapai kinerja 100%. Hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri (2020) disimpulkan bahwa terdapat permasalahan di dalam penerapan dan pelaksanaan SPM bidang kesehatan dengan perencanaan SPM menjadi masalah utama bagi daerah di Indonesia sebesar 36% lalu disusul dari permasalahan lainnya, yaitu pendanaan sebesar 26%, koordinasi sebesar 24% dan permasalahan lainnya sebesar 14%. Hal ini tentu menjadi masalah yang patut diperhatikan oleh daerah demi peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Permasalahan dalam pencapaian kinerja 100% untuk Standar Pelayanan Minimal kabupaten/kota diantaranya adalah perbedaan persepsi pelaksana dalam memahami definisi operasional dari suatu indikator Standar Pelayanan Minimal, kesulitan dalam memenuhi target pelayanan kesehatan, belum terdapat evaluasi mengenai pemenuhan standar jumlah dan kualitas pelayanan kesehatan, serta belum dilakukan perhitungan pembiayaan Standar Pelayanan Minimal secara benar dan belum dilakukan analisis mengenai penyebab belum terpenuhinya capaian Standar Pelayanan Minimal.

Pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes mellitus merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal kesehatan yang belum memenuhi target karena baru mencapai 89% pada tahun 2021. Diabetes mellitus disebabkan karena ada kelainan tubuh dalam memproduksi atau memanfaatkan hormone insulin yang dihasilkan sel beta pankreas yang menyebabkan kadar gula dalam darah melebihi ambang normal atau di atas 200 mg/dl. Pada penderita diabetes, ada gangguan keseimbangan antara transportasi gula ke dalam sel, gula yang di simpan di hati, dan gula yang di keluarkan dari hati. Tubuh mempunyai hormon-hormon lain yang fungsinya berlawanan dengan insulin, yaitu glukogon, epinefrin atau adrenalin, dan kortisol atau hormon steroid. Hormon-hormon ini memacu hati mengeluarkan glukosa sehingga gula darah bisa naik. Keseimbangan hormon-hormon dalam tubuh akan mempertahankan gula darah tetap dalam batas normal. Kadar trigliserida tinggi terjadi ketika seseorang banyak mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat atau kadar gula yang tinggi.

Menurut RISKESDAS 2013 sebanyak 69.6% penderita tidak terdiagnosis DM. Penyakit ini jika tidak segera ditangani akan mengakibatkan peningkatan resiko penyakit jantung dan stroke, impoten, peningkatan ulkus kaki yang disebabkan kerusakan saraf di kaki (neuropati) bahkan Peripheral Vascular Disease (PVD) yang dapat menyebabkan amputasi, resiko kebutaan, peningkatan resiko gagal ginjal sampai kematian. Penelitian ini mengenai implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo. Sesuai pengamatan awal menunjukkan adanya penderita diabetes mellitus berhubungan dengan perilaku masyarakat khususnya di Kota Gorontalo maupun Provinsi Gorontalo yang cenderung kurang aktif untuk mencari informasi mengenai diabetes mellitus secara menyeluruh, sehingga pengetahuan dan sikap masyarakat juga kurang guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Adanya perubahan gaya hidup masyarakat di Kota Gorontalo maupun Provinsi Gorontalo patut diduga menjadi pemicu meningkatnya prevalensi diabetes mellitus. Masyarakat kurang mengetahu mengenai faktor risiko obesitas dan kurangnya aktivitas fisik.

Berdasarkan wawancara awal dengan beberapa orang penderita diabetes mellitus di wilayah kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo menginformasikan bahwa mereka masih kurang memahami cara pola hidup sehat dan masih kurang memahami faktor-faktor penyebab diabetes mellitus. Masyarakat yang masih kurang pemahaman tentang pola hidup sehat bisa terpapar dengan faktor risiko obesitas yang dapat menjadi penyebab dari penyakit diabetes mellitus, jantung dan stroke. Sesuai wawancara awal dengan tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo menginformasikan mengenai

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

faktor-faktor yang mungkin berhubungan dengan Standar Pelayanan Minimal penderita diabetes mellitus antara lain yaitu kekurangan sumber daya manusia, belum meratanya sosialisasi mengenai pola hidup sehat kepada masyarakat. Sementara itu, budaya dan kesadaran masyarakat dimana masih ada kelompok masyarakat yang tertutup, serta hubungan lintas sektor yang tidak optimal.

Jika mencermati berbagai permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo, maka model teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn sangat cocok dan relevan untuk menganalisis implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo. Teori ini menyebutkan ada enam variabel yang memengaruhi hasil kinerja atau capaian kinerja dari sebuah kebijakan, diantaranya standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, dan lingkungan eksternal.

Alasan penggunaan teori Implementasi Kebijakan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn karena melalui analisis awal dapat dilihat bahwa aspek yang sangat menonjol dalam implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo berkaitan dengan pertama yaitu aspek sumber daya khususnya sumber daya manusia masih kekurangan tenaga medis baik dokter dan perawat. Kedua, sikap para pelaksana masih ada tenaga kesehatan yang kurang bersemangat dalam melakukan pelayanan. Ketiga, lingkungan eksternal khususnya ekonomi belum mendukung dalam implementasi program. Dengan melihat permasalahan, dan didukung oleh pendapat para ahli serta penelitian terdahulu, maka peneliti ingin mengembangkan sebuah penelitian lanjutan dengan judul: ”Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi Penderita Diabetes Mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di RSUD Otanaha Kota Gorontalo. Pada penelitian ini terdapat dua informan yaitu informan utama yaitu Kepala Ruangan Pelayanan yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* dan informan tringulasi yaitu tenaga Kesehatan yang terdiri dari unsur dokter dan unsur Perawat. Sumber informasi diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sampel pilihan yang dilakukan wawancara langsung secara terstruktur dengan informan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber secara tidak langsung dalam bentuk Laporan Kinerja Pelayanan Diabetes Mellitus di RSUD Otanaha Kota Gorontalo tahun 2022, 2023, dan 2024. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.

HASIL

Berdasarkan konteks penelitian, dapat dikonstruksi hasil penelitian ini sesuai fokus penelitian yaitu implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo dikaji dari standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, dan lingkungan eksternal. Secara rinci hasil penelitian dijabarkan berikut ini.

Standar dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo sudah diterapkan sesuai standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi kebijakan Permenkes No. 4/ 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Sesuai hasil observasi dapat dilihat bahwa Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo meliputi pengukuran gula darah, edukasi gaya hidup dan nutrisi, terapi farmakologi, serta pemberian rujukan bila perlu. Pengukuran Gula Darah Puasa (GDP) dilakukan setiap hari sebanyak 3 (tiga) porsi yaitu pada jam 06.00 Wita, 12.00 Wita dan 18.00 Wita. Sedangkan untuk edukasi gaya hidup dan nutrisi yaitu mengenai prolanis, edukasi pemakaian insulin, cara penggunaan

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

perlengkapan perawatan luka dan dosis kontrol yang harus dilakukan pasien. Sementara itu, terapi farmakologi berupa pemberian insulin jangka panjang dan pendek, serta secara oral sesuai hasil pemeriksaan gula darah.

Sesuai dengan penelusuran dokumen bahwa Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo sudah sesuai dengan Permenkes No. 4/ 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sesuai standar meliputi 1) Pengukuran gula darah, 2) Edukasi, dan 3) Terapi farmakologi. Mekanisme pelayanan adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: 1) Dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, 2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/ atau nutrisi, dan 3) Melakukan rujukan jika diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aspek standar dan tujuan kebijakan pada implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo sesuai standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi kebijakan Permenkes No. 4/ 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa komunikasi antar organisasi pelaksana pada implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo sudah baik, lancar, dan efektif.

Sesuai hasil observasi dapat dilihat bahwa pada dasarnya telah terjalin komunikasi dalam implementasi kebijakan Permenkes No. 4/ 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo dengan sangat baik dan lancar, antar tenaga kesehatan rumah sakit dengan pasien atau keluarga pasien maupun antar tenaga kesehatan. Koordinasi dalam implementasi kebijakan Permenkes No. 4/ 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo berjalan dengan efektif baik melalui pembicaraan tatap muka seperti rapat rutin bulanan yang dihadiri oleh bagian manajemen RSUD Otanaha dan setiap Kepala Ruangan. Hasil dari pertemuan tersebut kemudian akan disampaikan kepada staf di ruangan masing-masing, kemudian dari setiap ruangan akan membuat laporan terkait pertemuan tersebut.

Sosialisasi dalam implementasi kebijakan Permenkes No. 4/ 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo dilakukan secara rutin melalui edukasi dan penyuluhan kepada pasien. Manfaat sosialisasi implementasi kebijakan Permenkes No. 4/ 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo nampak pada pengetahuan pasien mengenai diabetes mellitus. Sesuai dengan penelusuran dokumen bahwa penanganan diabetes melittus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo melibatkan berbagai organisasi dan tim medis yang bekerja sama untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan yang komprehensif dan optimal. Beberapa organisasi yang terlibat pertama, Tim Medis terdiri dari 1) Dokter Spesialis Penyakit Dalam: Memimpin tim dan bertanggung jawab atas diagnosis, tata laksana, dan edukasi pasien DM; 2) Dokter Spesialis Gizi Klinik: Memberikan edukasi dan konseling terkait pola makan yang sesuai untuk pasien DM; 3) Perawat: Melakukan edukasi, pemantauan gula darah, pemberian obat, dan perawatan luka bagi pasien DM; 4) Ahli Gizi: Menyusun menu makanan khusus pasien DM sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien.

Kedua, Tim Non-Medis terdiri dari 1) Staf Administrasi: Mengurus administrasi pasien, termasuk pendaftaran, rekam medis, dan asuransi; 2) Ahli Farmasi: Menyiapkan dan memberikan obat-obatan kepada pasien DM sesuai dengan resep dokter; 3) Teknisi Laboratorium: Melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memantau kadar gula darah dan komplikasi dan 4) Tim Rekam Medis: Mengelola dan menyimpan rekam medis pasien DM. Ketiga, Organisasi Lainnya terdiri dari 1) Komite Etik Rumah Sakit: Memastikan penanganan pasien DM dilakukan dengan etis dan sesuai dengan standar medis dan 2) Badan Penjamin Mutu (BPJMK): Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutu pelayanan penanganan DM di rumah sakit. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi antar organisasi pelaksana pada implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo sudah baik, lancar, dan efektif melalui komunikasi percakapan langsung, koordinasi rapat rutin,

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan pelayanan bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo.

Sikap Para Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa adanya komitmen yang kuat dalam implementasi kebijakan Permenkes No. 4/ 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo khususnya. Antusiasme dan semangat para cukup tinggi dalam mengimplementasi kebijakan Permenkes No. 4 / 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo. Namun, para penderita diabetes mellitus masih ada yang kurang mendukung dalam pemberian pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Sesuai hasil observasi dapat dilihat bahwa komitmen Pemerintah Kota Gorontalo nampak dari pengalokasian anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo, serta keikutsertaan pihak Pemerintah Kota Gorontalo dalam rapat koordinasi. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo dan tenaga kesehatan juga nampak antusias dan memiliki semangat yang tinggi dalam melakukan pelayanan. Akan tetapi, dapat dilihat masih ada penderita diabetes mellitus yang memang menolak tindakan operasi dan medis lainnya.

Sesuai dengan penelusuran dokumen bahwa Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pasal 1 mewajibkan Pemerintah Kota menerapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Mekanisme Pelayanan 1) Penetapan sasaran penderita diabetes melitus ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data RISKESDAS terbaru yang di tetapkan oleh Menteri Kesehatan. 2) Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi: a) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan b) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi c) Melakukan rujukan jika diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aspek sikap pelaksana yaitu Pemerintah Kota Gorontalo, Manajemen Rumah Sakit, dan Tenaga Kesehatan antusias dan semangat dalam mengimplementasikan kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo. Namun demikian, masih ada penderita diabetes mellitus yang kurang sadar untuk mendukung dan menerima pelayanan tindakan medis yang diberikan kepadanya.

PEMBAHASAN

Standar dan Tujuan Kebijakan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek standar dan tujuan kebijakan pada implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo sesuai standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi kebijakan Permenkes No. 4/ 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Hal ini dapat dimaknai bahwa standar dan tujuan kebijakan merupakan alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu meningkatkan kesehatan pasien diabetes mellitus. Oleh karena itu, implementasi yang efektif dari Standar Pelayanan Minimal diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo membutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, RSUD, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, terlihat adanya upaya untuk menerapkan standar pelayanan sesuai regulasi yang berlaku.

Pelayanan kepada penderita diabetes mellitus di RSUD Otanaha sudah diupayakan sesuai Permenkes No. 4/2019, meliputi pengecekan gula darah, pemberian edukasi, dan pemberian obat. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran dari pihak rumah sakit untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai standar yang ditetapkan. Namun, perlu dicermati lebih lanjut apakah upaya tersebut telah mencakup seluruh aspek yang diatur dalam Permenkes, atau masih ada celah yang perlu ditingkatkan.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Informan pendukung memperkuat pernyataan tersebut dengan menjelaskan bahwa dokter dan perawat melakukan pelayanan sesuai regulasi Permenkes No. 4/2019. Penanganan pasien terdiagnosa diabetes mellitus meliputi pengecekan gula darah 3 kali sehari, pemberian edukasi, dan peresepan obat. Hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis dalam penerapan standar pelayanan. Namun, perlu dipertanyakan apakah frekuensi pengecekan gula darah tersebut berlaku untuk semua pasien atau disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien.

Standar pengobatan diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan pasien. Untuk pasien yang melakukan kontrol rutin sebulan sekali, dilakukan pengecekan gula darah puasa, peresepan obat, dan edukasi pola hidup sehat. Pernyataan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan standar, yang disesuaikan dengan kebutuhan individual pasien. Namun, perlu ditelaah lebih lanjut apakah fleksibilitas ini tetap dalam koridor standar yang ditetapkan atau justru menimbulkan inkonsistensi dalam pelayanan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rahmadani, dkk, (2021:152) yang menggunakan kerangka Donald Van Metter dan Carl Van Horn bahwa standar dan tujuan kebijakan pada implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo sesuai menunjukkan tujuan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus dilaksanakan sesuai dengan Permenkes RI dan sudah dapat diterapkan pada masyarakat yang memperhatikan kemampuan implementor tentang standar tujuan kebijakan. Jadi dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan yang tertuang dalam Permenkes RI dijalankan sesuai prosedur yang disampaikan dan sesuai dengan standar pelaksanaan serta sesuai dengan tujuan kebijakan dimana kebijakan yang dibuat memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam hal ini penderita diabetes mellitus.

Merse (dalam Kadji, 2015:70) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi antara lain oleh isi kebijakan. Berdasarkan pemaknaan di atas setidaknya penerapan standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo sesuai Permenkes No. 4/ 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dapat dilihat dari tiga standar. Pertama, menyediakan minimal 1 dokter spesialis penyakit dalam (atau spesialis endokrin) untuk setiap 4.000 pasien diabetes mellitus dengan tujuan untuk memastikan semua pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo mendapatkan akses yang mudah kepada dokter spesialis yang kompeten. Kedua, melakukan pemeriksaan gula darah minimal 4 kali setahun untuk semua pasien diabetes mellitus dengan tujuan untuk memantau kontrol gula darah pasien diabetes mellitus secara berkala dan melakukan intervensi yang tepat untuk mencegah komplikasi. Ketiga, menyediakan edukasi tentang diabetes mellitus dan cara mengelola diabetes mellitus kepada semua pasien diabetes mellitus dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pasien diabetes mellitus dalam mengelola penyakit mereka, sehingga dapat mencapai kontrol gula darah yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup.

Kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo harus selaras dengan standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi Permenkes No. 4/2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan untuk memastikan bahwa semua masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas. Dengan mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal diabetes mellitus yang selaras dengan Permenkes No. 4/2019, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo dapat berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita tercapainya kesehatan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo memiliki makna penting untuk memastikan adanya akses layanan yang berkualitas dengan menetapkan ketentuan minimal tentang jenis, cakupan, mutu, dan akses pelayanan diabetes mellitus yang harus disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo.

Hal ini guna kepastian semua pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pemerataan pelayanan perlu dilakukan dengan standarisasi pelayanan diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo untuk mencapai kualitas yang sama di seluruh wilayah kerja, sehingga pasien diabetes mellitus di Kota Gorontalo, mendapatkan pelayanan yang berkualitas setara, tanpa diskriminasi.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Standar dan tujuan kebijakan dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan melalui penetapan panduan yang jelas dan terukur untuk pelaksanaan pelayanan diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo. Hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan diabetes mellitus, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pasien dan menghasilkan outcomes yang lebih baik. Selan itu, akuntabilitas dan transparansi perlu dibangun melalui penetapan mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo terhadap standar pelayanan diabetes mellitus.

Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo sangat bergantung pada efektivitas komunikasi antar organisasi pelaksana. Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa aspek komunikasi antar organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan ini sudah berjalan dengan baik, lancar, dan efektif melalui berbagai saluran komunikasi. "Komunikasi yang terjalin sangat baik dan lancar, koordinasi juga efektif. Banyak sosialisasi dalam implementasi kebijakan Permenkes No. 4/ 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo. Model sosialisasi yang dilakukan melalui edukasi dan penyuluhan." Pernyataan ini menunjukkan adanya upaya yang terstruktur dan sistematis dalam membangun komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan.

Temuan penelitian bahwa aspek komunikasi antar organisasi pelaksana pada implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo sudah baik, lancar, dan efektif melalui rapat rutin, sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan pelayanan bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo. Hal ini dapat dimaknai bahwa adanya komunikasi yang efektif di antara organisasi pelaksana sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal untuk pasien diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo. Komunikasi yang kuat akan mendorong kolaborasi, koordinasi, dan penyelarasan upaya, memastikan bahwa semua pemangku kepentingan bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan layanan kepada pasien.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rahmadani, dkk, (2021:152) yang menggunakan kerangka Donald Van Metter dan Carl Van Horn bahwa komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana difokuskan pada sinergitas antar organisasi, baik dari Pemerintah Daerah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus. Proses mengimplementasikan kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus yang terjalin dilihat dari koordinasi yang dilakukan baik secara formal (sosialisasi) maupun informal (diskusi).

Edwards III (dalam Tahir, 2014:61) mengemukakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan, komunikasi memiliki peran sangat penting dalam melaksanakan suatu pekerjaan harus konsisten dengan menggunakan komunikasi yang baik. Agar komunikasi tidak salah dalam melaksanakan suatu kebijakan yang efisien dan tujuan yang telah ditetapkan berjalan. Dengan demikian adanya komunikasi yang baik antara pimpinan dan para pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo dapat membantu memastikan bahwa para pelaksana memahami tujuan dan sasaran program SPM. Salah satu informan memberikan insight yang menarik tentang komunikasi antar organisasi pelaksana: "Secara langsung kami melakukan komunikasi dengan berbagai pihak khususnya tim medis karena bisa dikatakan atasan kami itu adalah dokter spesialis yang menangani pasien. Koordinasi perawat dan dokter sangat lancar dimana kami menyampaikan laporan sejauhmana penangan kepada pasien."

Selain komunikasi internal dalam tim medis, penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya komunikasi dengan pasien dan keluarga. Informan pendukung menyatakan, "Untuk sosialisasi kami menyampaikan hal-hal penting terkait tindakan-tindakan yang dilakukan kepada mereka, makanan apa yang boleh dan tidak boleh mereka konsumsi, dan cara penggunaan insulin." Hal ini menunjukkan adanya upaya edukasi yang terstruktur kepada pasien dan keluarga, yang merupakan aspek penting dalam manajemen diabetes mellitus. Pernyataan ini menunjukkan adanya hierarki komunikasi yang jelas dalam tim medis, dimana dokter spesialis berperan sebagai pemimpin tim dan perawat sebagai pelaksana yang melaporkan perkembangan penanganan pasien. Komunikasi yang baik juga dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi para pelaksana dalam menjalankan

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

tugasnya. Berbagai aspek utama komunikasi yang efektif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo dapat dilakukan melalui penetapan saluran komunikasi yang jelas dan mapan antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo dan organisasi pelaksana lainnya, seperti puskesmas, klinik, dan organisasi pasien seperti Komunitas Penderita Diabetes Mellitus. Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo perlu menjaga rutinitas sosialisasi dan edukasi untuk membangun mekanisme membagi informasi secara teratur kepada pasien. Aspek penting lain dalam komunikasi rumah sakit adalah pemanfaatan alat teknologi khususnya arsip atau rekam medis elektronik.

Sikap Para Pelaksana

Implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo sangat dipengaruhi oleh sikap para pelaksana kebijakan. komitmen dan antusiasme para pelaksana kebijakan. Hasil wawancara dengan informan mengungkapkan bahwa "Sejauh ini tenaga Kesehatan di RSUD Otanaha sangat berkomitmen, antusias dan bersemangat dalam melayani pasien DM. Pada apel pagi pun Ibu Direktur selalu memberikan arahan tentang etika dalam pelayanan kepada pasien." Pernyataan ini menunjukkan adanya sikap positif dari para pelaksana kebijakan, mulai dari tingkat manajemen hingga tenaga kesehatan di lapangan. Sikap positif ini sejalan dengan pendapat Edwards III (dalam Tahir, 2014:61) yang mengemukakan bahwa sikap pelaksana diartikan sebagai watak atau karakteristik yang dimiliki aparat pelaksana seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Komitmen yang kuat dari para pelaksana merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Salah satu informan yang merupakan pasien rawat inap menyatakan, "Sikap para perawat selama kami dirawat sudah baik. Kalau ada yang kami butuhkan disampaikan kepada perawat. Respon mereka dapat menjawab apa yang kami tanyakan misalnya ada keluhan nyeri atau pusing." Diperkuat oleh pernyataan informan pendukung yang menyatakan, "Perawat dan dokter bersikap ramah kepada pasien dan keluarga. Mereka memberikan informasi tentang cara mengelola gula darah, pola makan, aktivitas fisik, dan penggunaan obat." Profesionalisme yang ditunjukkan oleh tenaga kesehatan ini mencerminkan kompetensi teknis dan interpersonal yang baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier (1983) yang menekankan pentingnya kompetensi dan dedikasi staf pelaksana dalam implementasi kebijakan. Namun, perlu diperhatikan bahwa profesionalisme ini harus dijaga konsistensinya dan terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.

Temuan penelitian bahwa aspek sikap pelaksana yaitu Pemerintah Kota Gorontalo, Manajemen Rumah Sakit, dan Tenaga Kesehatan antusias dan semangat dalam mengimplementasikan kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo. Hal ini bermakna bahwa sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di RSUD Otanaha Kota Gorontalo sangat penting untuk keberhasilan program ini. Sikap yang positif dan suportif dari para pelaksana dapat membantu memastikan bahwa pasien diabetes mellitus menerima pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rahmadani, dkk, (2021:152) yang menggunakan kerangka Donald Van Metter dan Carl Van Horn bahwa sikap pelaksana adalah sikap pelaksana dalam menerapkan kebijakan dalam Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus. Dalam menyampaikan kebijakan yang dibuat, dalam hal ini tentang Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus, tentunya dibutuhkan kerjasama dan sinergitas dari berbagai pihak yang terlibat.

Terkait dengan hal tersebut di atas perlu adanya komitmen yang kuat utamanya dari dokter dan perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien diabetes mellitus yang dapat diaktualisasikan dengan selalu mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang diabetes mellitus, menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dalam praktik sehari-hari, serta selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Para tenaga Kesehatan yang ada harus menjaga kepedulian terhadap kebutuhan dan kondisi pasien diabetes mellitus dengan memberikan perhatian dan mendengarkan dengan seksama keluhan pasien, memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang diabetes mellitus dan penanganannya, menunjukkan empati dan rasa simpati kepada pasien.

Edwards III (dalam Tahir, 2014:61) mengemukakan bahwa sikap pelaksana diartikan sebagai watak atau karakteristik yang dimiliki aparat pelaksana seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Dengan demikian aspek penting dalam sikap pelaksana ini adalah profesionalisme tenaga Kesehatan dalam menjalankan tugasnya dengan menjaga kerahasiaan informasi pasien, menjaga kebersihan dan kerapian diri dan lingkungan kerja, dan

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

menghormati pasien dan keluarganya. Para pelaksana harus bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien diabetes mellitus dengan berkomunikasi dengan baik dengan sesama pelaksana, saling membantu dan mendukung satu sama lain, dan bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman. Para pelaksana harus kreatif dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo dengan mengembangkan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mencari cara untuk mengatasi hambatan yang dihadapi, selalu berusaha untuk mencari cara yang lebih baik untuk memberikan pelayanan kepada pasien.

Dengan memiliki sikap-sikap tersebut, para pelaksana dapat membantu memastikan bahwa kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo dapat diimplementasikan dengan sukses dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pasien. Oleh karena itu, pimpinan dan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan motivasi, dukungan, dan kompetensi para pelaksana, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien diabetes mellitus. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pimpinan dan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo dengan memberikan pemberian pelatihan dan pendidikan, pemberian penghargaan atas prestasi yang diraih, dan penciptaan lingkungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo yang kondusif.

Namun demikian, masih ada penderita diabetes mellitus yang kurang sadar untuk mendukung dan menerima pelayanan tindakan medis yang diberikan kepadanya. tantangan dalam menghadapi sikap pasien. Meskipun sikap para pelaksana kebijakan cenderung positif, terdapat tantangan signifikan terkait dengan sikap pasien. Informan menyatakan, "Meskipun dukungan dan kesadaran para penderita diabetes mellitus ini masih kurang dan seringkali menolak tindakan seperti pembersihan luka dan tindakan lainnya." Pernyataan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara sikap pelaksana kebijakan dan sikap penerima layanan. Menanggapi hal ini, salah satu pasien rawat inap memberikan perspektif yang menarik: "Bukannya kami kurang sadar dengan tindakan yang akan kami terima, hanya saja kami takut atau kurang percaya diri untuk diamputasi. Namun berkat bujukan-bujukan dari dokter juga dorongan dari anggota keluarga lainnya, pada akhirnya kami bersedia untuk mendapatkan tindakan operasi untuk amputasi." Situasi ini mencerminkan kompleksitas implementasi kebijakan di lapangan, di mana sikap pelaksana harus berhadapan dengan realitas psikologis dan sosial pasien. Hal ini bermakna bahwa kurangnya kesadaran penderita diabetes mellitus untuk mendukung dan menerima pelayanan tindakan medis dapat menjadi hambatan besar dalam mencapai hasil pengobatan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan beberapa strategi untuk meningkatkan kesadaran pasien dengan edukasi dan komunikasi yang efektif secara berkelanjutan mengenai pentingnya diagnosis dini dan pengobatan yang tepat, komplikasi yang dapat terjadi jika diabetes tidak terkontrol dengan baik, dan manfaat dari mengikuti anjuran dokter dan pola hidup sehat.

Dokter dan perawat memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada pasien diabetes mellitus, karena mereka mungkin mengalami kecemasan, depresi, atau stres akibat penyakitnya, menciptakan lingkungan yang ramah dan suportif di fasilitas Kesehatan, melibatkan keluarga dan orang terdekat pasien dalam proses edukasi dan perawatan, serta memaksimalkan kelompok edukasi dan dukungan untuk pasien diabetes mellitus agar mereka dapat saling berbagi pengalaman dan motivasi. Sementara itu, pimpinan dan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan pasien dalam mengakses informasi dan layanan kesehatan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penderita diabetes mellitus untuk mendukung dan menerima pelayanan tindakan medis yang diberikan, sehingga mereka dapat mencapai hasil pengobatan yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka kesimpulan penelitian ini yaitu implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal bagi penderita diabetes mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Otanaha Kota Gorontalo sudah berjalan dengan baik. Dilihat dari aspek standar dan tujuan kebijakan, aspek komunikasi antar organisasi pelaksana, serta sikap pelaksana sudah terimplementasikan dengan baik.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, P. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator). Riau: Zanafa Publishing.

Azhari, M. T., Al Fajri Bahri, M. P., Asrul, M. S., & Rafida, T. (2023). *Metode penelitian kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Basalamah, F.F., Ahri, R.A., Arman. (2021). Pengaruh Kelelahan Kerja, Stress Kerja, Motivasi Kerja dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Perawat Di RSUD Kota Makassar. *An Idea Health Journal, 1(2),* 67-80. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.53690/ihj.v1i02.33>.

Chairina, R. R. L. (2019). *Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia (Studi Kasus Kinerja Perawat Rumah Sakit)*. Zifatama Jawara.

Fahmi, I. (2018). *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.

Hamdi, M. (2015). *Kebijakan Publik, Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia.

Hartamin, Nurlinda, A., & Jafar, N. (2020). Pengaruh Konsumsi Buah Naga Merah Terhadap Kadar Glukosa Darah pada Guru Sekolah Menengah yang Mengalami Prediabetes atau Prehipertensi di Makassar. *Nursing Inside Community, 2(3),* 86-93. <http://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/nic/article/view/327>.

Hery. (2019). *Manajemen Kinerja.* Jakarta: Grasindo.

Ihsan, N. F., Jafar, N., & Nurlinda, A. (2019). Pengaruh Konsumsi Buah Naga Terhadap Perubahan Trigliserida dan HDL Pada Guru Sekolah Menengah Di Makassar. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis, 14(2),* 169-174. <http://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/jikd/article/download/154/149>.

Kadji, Y. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Perilaku Birokrasi Dalam Realita*. Gorontalo: UNG Press.

Kasmir. (2019). Pengantar Manajemen. Jakarta: Prenadamedia Group

Kasnaini, Palutturi, S., Ahri, R.A. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Umum Instalasi Rawat Inap RSUD La Temmamala Soppeng Tahun 2018. *Jurnal Mitrasehat, 8(2),* 485-469.

Keban, Y. T. (2019). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Kuzairi, U., Yuswadi, H., Budiharjo, A., & Patriadi, H. B. (2017). Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pelayanan publik bidang pelayanan kesehatan (studi kasus pada rumah sakit umum dr. H. Koesnadi Bondowoso). *Politico*, *17*(2).

Malawat, R., Abdullah, R., & Nurlinda, A. (2019). Pengaruh Beban Kerja dan Stress Kerja Melalui Kelelahan Kerja Terhadap Kinerja Perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Islam Faisal Makassar. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosisi, 14(3),* 306-312. <http://www.libnh.stikesnh.ac.id/index.php/jikd/article/view/246>.

Pratiwi, E., KM, S., Anwar, A. A., & Rochka, M. M. (2023). *Quality Of Work Life Dan Komitmen Organisasi Perawat*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Rahmadani, A. N., Surjoputro, A., & Budiyanti, R. T. (2021). Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Penderita Diabetes Mellitus Di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, *9*(2), 149-156.

Richi, A. E., Tahir, I., & Lambelanova, R. (2022). Implementasi kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi. *MEDIUM: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, *10*(1), 338-355.

Rifa'i, M., Madjid, U., & Ismunarta, I. (2016). Implementasi kebijakan tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di puskesmas garawangi kabupaten kuningan provinsi jawa barat. *Jurnal Dharma Praja*, *9*(1), 25-43.

Rosmiati, Abdullah, R., & Andi Nurlinda. (2021). Pengaruh Beban Kerja dan Sikap Terhadap Kelelahan Kerja pada Perawat Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Islam Faisal Makassar. *Journal of Muslim Community Health, 2(3),* 81-94. <https://doi.org/10.52103/jmch.v2i3.549>.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia.

Subekti, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor Kendala di Dalam Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di UPT Puskesmas Palengaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 9(2),* 1-18.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik &* Transparansi *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.

Tua, H., & Maulana, M. A. (2016). *Kinerja Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis (Studi Kasus Pelayanan Pasien yang Dirujuk ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru)* (Doctoral dissertation, Riau University).

Wahyuni, N. (2021). Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Puskesmas Curug, Kota Serang. *Journal of Baja Health Science*, *1*(02), 179-190.

Wibowo. (2022). *Manajemen Kinerja*. Depok: Rajawali Pers.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license